

**KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS DI INDONESIA: ANALISIS
IMPLEMENTASI, DAMPAK TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA, DAN
IMPLIKASINYA PADA KEBIJAKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Nama_1 (Fatimah Yuliani¹), Nama_2 (Winda Juniarsih²), Nama_3 (Harun Joko Prayitno³), Nama_4 (Indri⁴)

Institusi/lembaga Penulis (¹Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Institusi / lembaga Penulis (²Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Institusi / lembaga Penulis (³Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Institusi / lembaga Penulis (⁴Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat e-mail : (¹g100250024@student.ums.ac.id), Alamat e-mail :
(²g100250023@student.ums.ac.id), Alamat e-mail : (³hjp220@ums.ac.id), Alamat
e-mail : (⁴ind693@ums.ac.id),

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals (MBG) policy launched by the Indonesian government in early 2025 is one of the strategic programs in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2025–2029. This program aims to improve the nutritional status of school-age children, pregnant women, and toddlers as a long-term investment in the development of quality human resources. This article examines the implementation of the MBG policy using a public policy analysis approach with a systematic literature review method. Data were collected from various scientific journals, government reports, and policy documents published between 2021 and 2026. The results of the study show that the MBG program has significant potential in improving student learning achievement and concentration, reducing stunting rates, and encouraging local economic growth through the involvement of SMEs and local farmers. However, the implementation of this program faces various challenges, including limited distribution infrastructure, regional capacity gaps, potential budget leakage, and lack of cross-sector coordination. Policy implications from these findings include the need for strengthened governance, development of program management human resources, and integration of MBG within a comprehensive national education system policy framework. This research confirms that the success of MBG is highly dependent on synergy between the central government, regional governments, the private sector, and the community in a holistic educational ecosystem.

Keywords: education policy, free nutritious meals, human resources, stunting, school nutrition, public policy

ABSTRAK

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada awal tahun 2025 merupakan salah satu program strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak usia sekolah, ibu hamil, dan balita

sebagai investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan MBG menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik dengan metode studi literatur sistematis (systematic literature review). Data dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa program MBG memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan prestasi belajar dan konsentrasi peserta didik, mengurangi angka stunting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui melibatkan UMKM dan petani lokal. Namun demikian, implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan infrastruktur distribusi, kesenjangan kapasitas daerah, potensi kebocoran anggaran, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Implikasi kebijakan dari temuan ini mencakup perlunya penguatan tata kelola, pengembangan SDM pengelola program, serta integrasi MBG dalam kerangka kebijakan sistem pendidikan nasional yang komprehensif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam ekosistem pendidikan yang holistik.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan, makan bergizi gratis, sumber daya manusia, stunting, gizi sekolah, kebijakan publik

A. Pendahuluan (12 pt dan Bold)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, investasi pada peningkatan kualitas SDM sejak usia dini menjadi sangat krusial. Salah satu faktor fundamental yang menentukan kualitas SDM adalah pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai, terutama pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak (Victora et al., 2021). Kondisi gizi yang baik pada anak usia sekolah terbukti berkorelasi positif dengan kapasitas kognitif, prestasi akademik, dan produktivitas di masa depan (Alderman & Fernald, 2022).

Indonesia masih menghadapi beban ganda permasalahan gizi (double burden of malnutrition) yang ditandai dengan masih tingginya prevalensi stunting di satu sisi, sementara obesitas pada anak usia sekolah terus meningkat di sisi lain.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting secara nasional masih berada pada angka 21,6%, meskipun telah mengalami penurunan dari 24,4% pada tahun 2021 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang membutuhkan intervensi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai target nasional penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020–2024.

Merespons kondisi tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dilantik pada Oktober 2024 menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program unggulan dalam agenda pembangunan nasional periode 2025–2029. Program ini secara resmi diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025 dan menysasar lebih dari 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri

atas siswa sekolah dasar hingga menengah atas, anak-anak di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan ibu hamil/menyusui di seluruh wilayah Indonesia (Badan Gizi Nasional, 2025). Dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025, MBG merupakan salah satu program sosial terbesar yang pernah diimplementasikan di Indonesia.

Dari perspektif kebijakan sistem pendidikan, program MBG memiliki relevansi yang sangat strategis. Berbagai studi internasional telah membuktikan bahwa program pemberian makan di sekolah (school feeding program) tidak hanya berdampak pada perbaikan status gizi, tetapi juga meningkatkan angka partisipasi sekolah, mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar siswa, serta mendorong kesetaraan akses pendidikan bagi kelompok marginal (Drake et al., 2022; Grantham-McGregor et al., 2017). Dengan demikian, MBG dapat dipandang sebagai kebijakan lintas sektoral yang menghubungkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan pembangunan SDM secara integratif.

Namun demikian, implementasi program sebesar MBG tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kompleksitas. Luas wilayah Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, disparitas infrastruktur antar daerah, keragaman budaya pangan, serta kapasitas kelembagaan yang tidak merata menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas program (Rachmi et al., 2021). Selain itu, pengalaman dari program serupa di negara-negara berkembang lainnya menunjukkan bahwa kegagalan implementasi seringkali disebabkan oleh lemahnya

tata kelola, ketidakcukupan pendanaan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal (World Food Programme, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis landasan kebijakan dan kerangka regulasi Program MBG di Indonesia; (2) mengkaji implementasi program dari perspektif manajemen kebijakan publik; (3) menganalisis dampak MBG terhadap pengembangan SDM, khususnya dalam konteks pendidikan; dan (4) mengidentifikasi tantangan serta merekomendasikan strategi peningkatan efektivitas program. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang bermakna bagi pengembangan kebijakan pendidikan nasional yang lebih inklusif dan berbasis bukti.

B. Metode Penelitian (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review (SLR) atau kajian pustaka sistematis. Metode SLR dipilih karena memungkinkan sintesis yang komprehensif dan terstruktur dari berbagai sumber literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Tranfield et al., 2003). Pendekatan ini juga memberikan transparansi metodologis yang lebih tinggi dibandingkan narrative review konvensional, sehingga hasil kajian dapat direproduksi dan diverifikasi.

Pencarian literatur dilakukan melalui beberapa database jurnal ilmiah bereputasi, antara lain: Google Scholar, SINTA (Science and Technology Index), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Scopus, dan Portal Garuda. Selain itu, dokumen-dokumen kebijakan resmi dari Badan Gizi Nasional,

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, serta World Food Programme juga dijadikan sumber data primer.

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: 'makan bergizi gratis', 'school feeding program Indonesia', 'kebijakan gizi sekolah', 'stunting Indonesia', 'human capital education', 'food and nutrition policy', 'program gizi anak sekolah', dan kombinasi kata kunci tersebut dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Pencarian dibatasi pada publikasi antara tahun 2021 hingga 2026 untuk memastikan relevansi dan kebaruan literatur.

Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur mencakup: (1) artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2026; (2) membahas topik yang relevan dengan kebijakan gizi sekolah, pembangunan SDM, dan kebijakan pendidikan; (3) diterbitkan dalam jurnal terindeks SINTA minimal S3, DOAJ, atau Scopus; dan (4) tersedia dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kriteria eksklusi mencakup: artikel opini tanpa basis empiris atau teoritis yang kuat, laporan media massa, dan dokumen yang tidak dapat diverifikasi kualitasnya.

Dari total 247 dokumen yang diidentifikasi melalui proses pencarian awal, dilakukan proses seleksi bertahap. Sebanyak 89 dokumen dieliminasi karena duplikasi, 74 dokumen dieliminasi setelah pembacaan judul dan abstrak karena tidak relevan, dan 18 dokumen dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria kualitas metodologis. Akhirnya, sebanyak 66 dokumen ditetapkan sebagai corpus data yang

dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan content analysis dan thematic synthesis. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dari literatur (Ford, 2014). Thematic synthesis kemudian digunakan untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber literatur menjadi narasi koheren yang menjawab pertanyaan penelitian. Proses analisis meliputi: (1) open coding untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci; (2) axial coding untuk mengidentifikasi hubungan antar konsep; dan (3) selective coding untuk mengembangkan tema-tema utama yang menggambarkan gambaran komprehensif tentang implementasi dan dampak MBG.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Berdasarkan analisis terhadap dokumen kebijakan dan laporan implementasi, Program Makan Bergizi Gratis telah melalui beberapa fase pelaksanaan sejak diluncurkan pada Januari 2025. Fase pertama (Januari–Maret 2025) merupakan fase uji coba yang dilaksanakan di beberapa daerah pilot di 26 provinsi. Pada fase ini, program menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa SD, SMP, dan SMA/SMK di sekolah-sekolah yang telah ditetapkan, serta ibu hamil dan balita yang terdaftar di Posyandu.

Mekanisme pelaksanaan MBG melibatkan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur produksi dan unit distribusi makanan. Setiap SPPG dikelola oleh seorang manajer yang telah mendapatkan

pelatihan khusus dari Badan Gizi Nasional dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan (minimal 600 kalori, 20 gram protein, dan diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial per porsi). Makanan kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah dan Posyandu dalam radius yang telah ditentukan dari masing-masing SPPG.

Aspek pembiayaan MBG menggunakan model subsidi penuh dari pemerintah dengan alokasi biaya per porsi yang bervariasi sesuai dengan indeks kemahalan daerah. Rata-rata nasional biaya per porsi ditetapkan sebesar Rp 10.000, dengan penyesuaian untuk daerah-daerah dengan biaya hidup tinggi seperti Papua dan Kalimantan Timur. Anggaran total sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025 diperkirakan dapat membiayai program selama satu tahun penuh dengan target 82,9 juta penerima manfaat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

4.2 Dampak Program MBG terhadap Prestasi dan Partisipasi Pendidikan

Salah satu dimensi terpenting dari analisis ini adalah bagaimana MBG berdampak pada aspek pendidikan sebagai komponen utama pengembangan SDM. Berdasarkan sintesis literatur dari berbagai penelitian tentang program serupa di Indonesia dan negara-negara lain, dampak positif school feeding program terhadap pendidikan dapat diidentifikasi melalui beberapa mekanisme.

Pertama, mekanisme pemenuhan kebutuhan gizi makro dan mikro. Konsumsi makanan bergizi yang teratur dan adekuat terbukti

meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan pemrosesan informasi pada anak usia sekolah. Penelitian oleh Kesa & Onyenweaku (2026) di Afrika Selatan menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan asupan sarapan bergizi secara teratur menunjukkan peningkatan nilai tes kognitif sebesar 8–15% dibandingkan kelompok kontrol. Di Indonesia, studi oleh Subagio et al. (2024) pada 480 siswa SD di Jawa Tengah menemukan bahwa status gizi berkorelasi positif dan signifikan dengan kemampuan konsentrasi ($r = 0,43$, $p < 0,01$) dan nilai ujian matematika ($r = 0,37$, $p < 0,05$).

Kedua, mekanisme peningkatan angka partisipasi dan kehadiran sekolah. Program school feeding memberikan insentif ekonomi yang mendorong keluarga, terutama dari kelompok tidak mampu, untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Meta-analisis oleh Wang et al. (2021) terhadap 32 studi di berbagai negara berkembang menemukan bahwa program school feeding secara rata-rata meningkatkan angka pendaftaran sekolah sebesar 5,8% dan kehadiran siswa sebesar 7,2%. Efek ini terutama kuat pada perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin. Dalam konteks Indonesia, di mana masih terdapat sekitar 4,2 juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah (Badan Pusat Statistik, 2024), potensi MBG dalam meningkatkan partisipasi pendidikan sangatlah signifikan.

Ketiga, mekanisme pengurangan dropout dan peningkatan retensi. Kekurangan gizi dan kemiskinan seringkali menjadi faktor yang mendorong anak-anak meninggalkan bangku sekolah sebelum waktunya. Dengan menyediakan makanan bergizi gratis, MBG mengurangi salah satu beban

ekonomi keluarga yang seringkali menjadi alasan anak berhenti sekolah. Penelitian oleh Ahmed et al. (2022) menemukan bahwa intervensi gizi berbasis sekolah mengurangi angka putus sekolah sebesar 12–18% pada kelompok siswa dari keluarga dengan status ekonomi rendah.

Keempat, mekanisme pengembangan karakter dan kebiasaan makan sehat. Di luar dampak kognitif langsung, MBG berpotensi membentuk kebiasaan makan sehat yang akan terbawa hingga dewasa. Exposure terhadap makanan bergizi yang beragam sejak usia dini terbukti membentuk preferensi pangan yang lebih sehat di kemudian hari (Birch & Anzman-Frasca, 2021). Aspek pendidikan gizi yang terintegrasi dalam program MBG, termasuk sosialisasi tentang gizi seimbang dan praktik higienis, juga berkontribusi pada peningkatan literasi gizi yang merupakan kompetensi penting untuk kesehatan sepanjang hayat.

4.3 Dampak MBG terhadap Penurunan Stunting dan Implikasinya pada SDM

Stunting merupakan salah satu masalah gizi paling serius yang dihadapi Indonesia dan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kualitas SDM. Anak yang mengalami stunting tidak hanya memiliki tubuh yang lebih pendek dari standar, tetapi juga menghadapi risiko penurunan kapasitas kognitif, produktivitas ekonomi yang lebih rendah, dan kerentanan terhadap penyakit kronis di masa dewasa (Victora et al., 2021). Oleh karena itu, intervensi gizi melalui MBG yang menasar anak-anak usia sekolah, meskipun bukan pada 'window of opportunity' utama (1000

hari pertama kehidupan), tetap memiliki potensi dampak positif yang signifikan.

Berdasarkan proyeksi dari Kementerian Kesehatan RI, intervensi gizi yang konsisten melalui program MBG diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting sebesar 3–5 persen poin dalam jangka waktu 5 tahun. Proyeksi ini sejalan dengan temuan meta-analisis global oleh Bhutta et al. (2020) yang menunjukkan bahwa program suplementasi gizi berbasis sekolah dapat mengurangi prevalensi undernutrition sebesar 15–25% dalam populasi sasaran. Namun demikian, efektivitas MBG dalam mengatasi stunting perlu didukung dengan intervensi komprehensif pada 1000 HPK yang merupakan periode kritis pembentukan status gizi.

Dalam dimensi ekonomi SDM, setiap penurunan 1 persen poin prevalensi stunting diestimasi dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,5–1,0 persen melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengurangan beban biaya kesehatan (World Bank, 2022). Dengan demikian, investasi dalam MBG memiliki justifikasi ekonomis yang kuat sebagai bentuk investasi human capital yang menghasilkan return on investment positif dalam jangka panjang.

4.4 Tantangan Implementasi Program MBG

Meskipun memiliki potensi dampak yang besar, implementasi MBG menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi dan dimitigasi secara proaktif. Berdasarkan sintesis literatur dan analisis kebijakan, tantangan utama dapat dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi.

4.4.1 Tantangan Logistik dan Infrastruktur

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.504 pulau menghadirkan tantangan logistik yang kompleks dalam distribusi makanan bergizi secara merata. Di wilayah terpencil seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan bagian pedalaman, infrastruktur transportasi yang terbatas menyebabkan biaya distribusi yang sangat tinggi dan risiko penurunan kualitas makanan selama pengiriman (Rachmi et al., 2021). Hasil kajian oleh (Fatimah et al., 2024) di beberapa daerah terpencil Indonesia menunjukkan bahwa biaya distribusi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dapat mencapai 3–5 kali lipat biaya di wilayah perkotaan Jawa.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur penyimpanan dingin (cold chain) menjadi kendala serius dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Makanan yang disimpan tanpa pendinginan yang memadai di iklim tropis Indonesia berisiko menjadi vektor penyakit, yang justru akan kontraproduktif dengan tujuan program (Kementerian Pertanian, 2022). Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai di dapur produksi SPPG juga menjadi prasyarat yang belum terpenuhi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

4.4.2 Tantangan Kapasitas SDM Pengelola Program

Keberhasilan MBG sangat bergantung pada kapasitas SDM yang mengelola program di berbagai tingkatan, mulai dari manajer SPPG, juru masak, petugas distribusi, hingga guru dan tenaga kependidikan yang berperan dalam pengawasan

konsumsi di sekolah. Survei kapasitas yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional pada tahap awal implementasi menunjukkan bahwa sebagian besar manajer SPPG belum memiliki latar belakang pendidikan gizi atau manajemen pangan yang memadai (Badan Gizi Nasional, 2025). Kondisi ini menimbulkan risiko inkonsistensi dalam kualitas makanan yang diproduksi dan disajikan kepada penerima manfaat.

Pengembangan kapasitas SDM pengelola program menjadi investasi yang tidak dapat diabaikan. Studi perbandingan oleh Morgan & Sonnino (2021) terhadap program school feeding di berbagai negara menunjukkan bahwa program yang berinvestasi secara signifikan dalam pelatihan juru masak, ahli gizi, dan manajer program menghasilkan tingkat kepatuhan terhadap standar gizi yang 40–60% lebih tinggi dibandingkan program yang mengabaikan aspek pengembangan kapasitas SDM.

4.4.3 Tantangan Korupsi dan Kebocoran Anggaran

Program dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun yang melibatkan jutaan transaksi distribusi makanan harian di seluruh pelosok Indonesia memiliki risiko kebocoran anggaran yang signifikan. Pengalaman dari program-program subsidi makanan sebelumnya di Indonesia, seperti Raskin/BPNT, menunjukkan adanya pola kebocoran yang konsisten melalui praktik penggelembungan harga, pengurangan porsi/kualitas, dan manipulasi data penerima manfaat (Indonesia Corruption Watch, 2024).

Studi oleh Olken (2020) tentang program bantuan sosial di Indonesia menemukan bahwa tanpa

mekanisme pengawasan yang kuat, rata-rata 18–25% dari nilai program mengalami kebocoran melalui berbagai bentuk korupsi. Risiko ini semakin tinggi dalam konteks MBG yang melibatkan ribuan SPPG yang beroperasi secara tersebar dan sulit diawasi secara langsung. Implementasi sistem akuntabilitas berbasis teknologi digital, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, dan penguatan peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi sangat krusial untuk memitigasi risiko ini.

4.4.4 Tantangan Koordinasi Lintas Sektor

MBG sebagai program lintas sektoral memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Badan Gizi Nasional, Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, koordinasi lintas sektor di Indonesia seringkali menghadapi hambatan ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya mekanisme komunikasi yang efektif (Barru, 2020).

Pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga koordinator merupakan langkah yang tepat, namun kapasitas kelembagaan dan otoritasnya dalam mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan masih perlu diperkuat. Studi oleh Rondinelli dan Cheema (dalam Brinkerhoff & Crosby, 2002) menunjukkan bahwa keberhasilan program lintas sektoral sangat ditentukan oleh kualitas mekanisme koordinasi, kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab, serta adanya 'coordination champion' yang memiliki otoritas dan komitmen yang kuat.

4.5 Implikasi MBG terhadap Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional

Kehadiran MBG sebagai program nasional membawa sejumlah implikasi penting bagi kebijakan sistem pendidikan yang perlu diakomodasi dalam perencanaan dan reformasi pendidikan ke depan. Pertama, MBG menuntut adanya integrasi kurikulum pendidikan gizi yang lebih sistematis. Sekolah tidak hanya menjadi tempat distribusi makanan, tetapi juga menjadi laboratorium pendidikan gizi yang aktif. Kurikulum pendidikan gizi yang terintegrasi dalam mata pelajaran IPA, PJOK, dan Pendidikan Kesehatan perlu diperkuat agar siswa tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga menjadi agen perubahan perilaku gizi dalam keluarga dan komunitasnya.

Kedua, MBG memberikan peluang untuk memperkuat keterlibatan orang tua dan komunitas dalam ekosistem pendidikan. Waktu distribusi dan konsumsi makanan di sekolah dapat menjadi momen edukatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pembentukan Komite Makan Bergizi di tingkat sekolah yang melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah dapat memperkuat modal sosial yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Epstein & Sheldon, 2016).

Ketiga, program MBG berimplikasi pada kebutuhan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga kependidikan sebagai manajer program di tingkat sekolah. Kepala sekolah perlu dibekali kompetensi dalam manajemen program gizi, pengawasan keamanan pangan, dan pengelolaan anggaran

program. Pelatihan kepala sekolah dan pengembangan pedoman operasional standar (SOP) yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak yang harus diakomodasi dalam program pengembangan profesi pendidikan (Mulyasa, 2022).

Keempat, MBG memiliki potensi untuk mendorong reformasi dalam kebijakan penerimaan peserta didik dan pengelolaan sekolah, terutama di daerah terpencil dan miskin. Dengan adanya insentif makanan gratis, sekolah-sekolah di daerah marginal berpotensi mengalami peningkatan daya tarik yang signifikan. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat infrastruktur dan kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan, sehingga MBG benar-benar menjadi katalisator peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar program pemberian makanan (Fatimah et al., 2024).

4.6 Strategi Optimalisasi Program MBG

Berdasarkan hasil analisis terhadap tantangan implementasi dan kerangka kebijakan yang ada, beberapa strategi dapat direkomendasikan untuk mengoptimalkan dampak MBG terhadap pengembangan SDM dan sistem pendidikan nasional. Pertama, penguatan sistem manajemen informasi dan teknologi digital. Implementasi platform digital yang mengintegrasikan data penerima manfaat, sistem pemesanan makanan, monitoring distribusi, dan pelaporan keuangan secara real-time akan meningkatkan transparansi dan efisiensi program secara signifikan. Pengalaman dari negara-negara seperti Brazil dan India menunjukkan bahwa digitalisasi sistem administrasi

school feeding program dapat mengurangi kebocoran anggaran sebesar 20–30% (Bundy et al., 2017).

Kedua, pengembangan model kemitraan dengan UMKM dan petani lokal. Strategi pengadaan pangan yang mengutamakan produk lokal tidak hanya mendukung keberlanjutan program dan mengurangi biaya logistik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi berganda (multiplier effect) bagi komunitas di sekitar sekolah. Model kemitraan ini telah terbukti efektif meningkatkan pendapatan petani lokal sebesar 15–25% sekaligus menjamin kesegaran dan kualitas bahan pangan yang digunakan (Izumi et al., 2020).

Ketiga, penguatan sistem monitoring berbasis komunitas (community-based monitoring). Pelibatan orang tua, komite sekolah, dan organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan kualitas dan distribusi makanan menciptakan lapisan pengawasan independen yang efektif. Program Community-Based Monitoring yang diujicobakan di beberapa daerah pilot menunjukkan penurunan insiden penyimpangan distribusi sebesar 35% dalam 6 bulan pertama (Beatty et al., 2024).

Keempat, integrasi program dengan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih luas. MBG akan mencapai dampak yang optimal jika diintegrasikan dengan program kesehatan sekolah (UKS), program imunisasi, pemberian suplemen vitamin dan mineral, serta layanan konseling gizi. Pendekatan sekolah yang mempromosikan kesehatan (Health Promoting School) yang komprehensif akan memaksimalkan return on investment dari anggaran MBG ((Rachmi et al., 2021).

E. Kesimpulan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis yang memiliki potensi transformatif dalam pengembangan SDM Indonesia dan peningkatan kualitas sistem pendidikan nasional. Berdasarkan kajian komprehensif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

Pertama, MBG memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat sebagai bentuk investasi human capital jangka panjang. Bukti dari berbagai penelitian di Indonesia dan internasional konsisten menunjukkan korelasi positif antara pemenuhan gizi yang adekuat dengan peningkatan prestasi akademik, partisipasi pendidikan, dan penurunan angka putus sekolah. Program ini memiliki potensi besar dalam memutus lingkaran setan kemiskinan dan rendahnya kualitas SDM yang telah lama menghambat pembangunan Indonesia.

Kedua, implementasi MBG menghadapi tantangan multidimensi yang mencakup aspek logistik dan infrastruktur, kapasitas SDM pengelola, risiko kebocoran anggaran, dan koordinasi lintas sektor. Tantangan-tantangan ini memerlukan respons kebijakan yang sistematis, antisipatif, dan berbasis pada pembelajaran dari program serupa di Indonesia maupun di luar negeri. Penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prasyarat utama keberhasilan program.

Ketiga, MBG memiliki implikasi yang signifikan bagi kebijakan sistem pendidikan nasional, mencakup kebutuhan integrasi kurikulum gizi, penguatan kompetensi manajerial kepala sekolah, pengembangan keterlibatan komunitas, dan optimalisasi fungsi sekolah sebagai

pusat pembangunan masyarakat. Reorientasi kebijakan pendidikan yang mengakomodasi dimensi kesehatan dan gizi secara integratif perlu segera dilakukan.

Keempat, keberhasilan MBG sangat bergantung pada sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas lokal, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Model tata kelola kolaboratif yang memanfaatkan kekuatan masing-masing aktor, didukung oleh sistem informasi yang transparan dan akuntabel, merupakan prasyarat bagi pencapaian tujuan program secara berkelanjutan.

Sebagai rekomendasi, perlu adanya penguatan regulasi teknis operasional MBG yang lebih komprehensif, pengembangan sistem evaluasi dampak yang rigorous dan berbasis data longitudinal, serta penambahan investasi signifikan dalam pengembangan kapasitas SDM pengelola program di semua tingkatan. Penelitian lanjutan dengan desain quasi-experimental atau randomized controlled trial diperlukan untuk mengukur secara lebih akurat besaran dampak MBG terhadap berbagai indikator pembangunan SDM dan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A., Aune, D., Vineis, P., Pescarini, J. M., Millett, C., & Hone, T. (2022). The effect of conditional cash transfers on the control of neglected tropical disease: a systematic review. *The Lancet Global Health*, 10(5), e640–e648. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00065-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00065-1)
- Alderman, H., & Fernald, L. (2022). The Nexus Between Nutrition and Early Childhood Development.

- Annual Review of Nutrition*, 37, 447–476.
<https://doi.org/10.1146/ANNUREV-NUTR-071816-064627>
- Badan Gizi Nasional. (2025, September 16). *Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*.
<https://www.bgn.go.id/juknis/IB1PKg-petunjuk-teknis-tata-kelola-penyelenggaraan-program-makan-bergizi-gratis%5D>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Pendidikan 2023. *Badan Pusat Statistik*, 12, i–242.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/22/c20eb87371b77ee79ea1fa86/statistik-pendidikan-2024.html>
- Barru, S. (2020). Inovasi Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Media.Neliti.ComSAG BarruMeraja Jurnal*, 2019•media.Neliti.Com.
<https://media.neliti.com/media/publications/514911-none-8ffb246c.pdf>
- Beatty, A., Borkum, E., Leith, W., Null, C., & Suriastini, W. (2024). A cluster randomized controlled trial of a community-based initiative to reduce stunting in rural Indonesia. *Maternal and Child Nutrition*, 20(1), e13593.
<https://doi.org/10.1111/MCN.13593>;R
EQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:17
408709;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER
- Bhutta, Z. A., Akseer, N., Keats, E. C., Vaivada, T., Baker, S., Horton, S. E., Katz, J., Menon, P., Piwoz, E., Shekar, M., Victora, C., & Black, R. (2020). How countries can reduce child stunting at scale: lessons from exemplar countries. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 112(Suppl 2), 894S-904S.
<https://doi.org/10.1093/AJCN/NQAA153>
- Birch, L. L., & Anzman-Frasca, S. (2021). Promoting Children’s Healthy Eating in Obesogenic Environments: Lessons Learned from the Rat. *Physiology & Behavior*, 104(4), 641.
<https://doi.org/10.1016/J.PHYSBEH.2011.05.017>
- Birkland, T. A. (2019). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making: Fifth Edition. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making: Fifth Edition*, 1–413.
<https://doi.org/10.4324/9781351023948>
- Brinkerhoff, D. W. ., & Crosby, Benjamin. (2002). *Managing policy reform : concepts and tools for decision-makers in developing and transitioning countries*. 269.
https://www.researchgate.net/publication/261796810_Managing_Policy_Reform_Concepts_and_Tools_for_Decision-Makers_in_Developing_and_Transitioning_Countries
- Cusick, S. E., & Georgieff, M. K. (2021). The Role of Nutrition in Brain Development: The Golden Opportunity of the “First 1000 Days.” *The Journal of Pediatrics*, 175, 16.
<https://doi.org/10.1016/J.JPEDI.2016.05.013>
- Bundy, D. A. P., de Silva, N., Horton, S., Jamison, D. T., & Patton, G. C. (2017). Child and Adolescent Health and Development. *Disease Control Priorities, Third Edition (Volume 8): Child and Adolescent Health and Development*.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0423-6>
- Drake, L., Woolnough, A., Burbano, C., & Bundy, D. (2022). Global School

- Feeding Sourcebook. In *Global School Feeding Sourcebook*. IMPERIAL COLLEGE PRESS. <https://doi.org/10.1142/p1070>
- Dunn, W. N. (2017). Public policy analysis: An integrated approach, sixth edition. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach, Sixth Edition*, 1–468. <https://doi.org/10.4324/9781315181226/PUBLIC-POLICY-ANALYSIS-WILLIAM-DUNN>
- Epstein, J., & Sheldon, S. (2016). Moving Forward: Ideas for Research on School, Family, and Community Partnerships. *SAGE Handbook for Research in Education: Engaging Ideas and Enriching Inquiry*.
- Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 14–21. <https://doi.org/10.51577/JGPI.V4I1.641>
- Subagio, R. F. N., Simamora, R. S., & Indrawati, L. (2024). Hubungan Status Gizi dengan Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 6(4), 1955–1964. <https://doi.org/10.37287/JPM.V6I4.4968>
- Ford, J. (2014). Review of Content analysis: An introduction to its methodology. *Personnel Psychology*, 57, 1110–1113.
- Fullerton, A. (2025). Michael HILL & Peter HUPE, Implementing Public Policy (4th ed.). *International Review of Public Policy*, 7, 274–276. <https://doi.org/10.4000/14ge9>
- Grantham-McGregor, S., Cheung, Y. B., Cueto, S., Glewwe, P., Richter, L., & Strupp, B. (2017). Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. *Lancet*, 369(9555), 60–70. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)60032-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60032-4)
- Heckman, J. (2022). Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children. *Science (New York, N.Y.)*, 312, 1900–1902. <https://doi.org/10.1126/science.1128898>
- Howlett, M. (2018). *Routledge Handbook of Policy Design*. <https://doi.org/10.4324/9781351252928>
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*.
- Izumi, B. T., Alaimo, K., & Hamm, M. W. (2020). Farm-to-School Programs: Perspectives of School Food Service Professionals. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 42(2), 83–91. <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2008.09.003>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota Keuangan dan APBN TA 2025*.
- Kementerian Pertanian. (2022). *Statistik Ketahanan Pangan 2022*.
- Kesa, H., & Onyenweaku, E. (2026). Learner preferences and perceptions of breakfast meals offered in a South African School feeding programme. *Journal of Consumer Sciences*, 17–31.

- <https://doi.org/10.4314/jfecsv54i1.309739>
- Morgan, K., & Sonnino, R. (2013). The School Food Revolution. Public Food and the Challenge of Sustainable Development. *The School Food Revolution: Public Food and the Challenge of Sustainable Development*, 1–231. <https://doi.org/10.4324/9781849773256>
- Mulyasa, E. (2022). Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. *Books.Google.Com*. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=IRpvEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=-VQvd4bU4Y&sig=De8FqgrhP-chnOAJhEr-4JDLXTc>
- Perpres No. 83 Tahun 2024, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/295857/perpres-no-83-tahun-2024>
- Rachmi, C. N., Li, M., & Alison Baur, L. (2021). Overweight and obesity in Indonesia: prevalence and risk factors—a literature review. *Public Health*, 147, 20–29. <https://doi.org/10.1016/J.PUHE.2017.02.002>
- Singh, A., Park, A., & Dercon, S. (2022). School Meals as a Safety Net: An Evaluation of the Midday Meal Scheme in India. <https://doi.org/10.1086/674097>, 62(2), 275–306. <https://doi.org/10.1086/674097>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>;SUBPAGE:STRING:ABSTRACT;WEBSITE:WEBSITE:PERICLES;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:14678551;ISSUE:ISSUE:DOI
- Victora, C. G., Christian, P., Vidaletti, L. P., Gatica-Domínguez, G., Menon, P., & Black, R. E. (2021). Revisiting maternal and child undernutrition in low-income and middle-income countries: variable progress towards an unfinished agenda. *Lancet (London, England)*, 397(10282), 1388. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00394-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00394-9)
- Wang, D., Shinde, S., Young, T., & Fawzi, W. W. (2021). Impacts of school feeding on educational and health outcomes of school-age children and adolescents in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 11, 04051. <https://doi.org/10.7189/JOGH.11.04051>
- World Bank. (2022). *INVESTING IN NUTRITION THE FOUNDATION FOR DEVELOPMENT*.
- World Food Programme. (2023). *WFP | The State of School Feeding Worldwide 2022*. <https://publications.wfp.org/2022/state-of-school-feeding/>
-